

# PAD Jadi Mampet, Lapangan Kerja Seret



- ▶ Rudi Panggil Pengusaha Hiburan
- ▶ Pajak Hiburan Kempes

**BATAM, TRIBUN** - Kenaikan pajak hiburan di Batam mulai berlaku Maret 2018 nanti. Namun beberapa bisnis hiburan yang menjadi objek pajak sudah rontok.

Pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak hiburan, terancam berkurang dengan tutupnya sejumlah tempat hiburan Lantas apa langkah Wali Kota Batam, HM Rudi?

Ditemui di kantornya, Rudi mengatakan



**VIDEO**  
**TEMPAT HIBURAN**  
**BERGUGURAN**

akan mengundang pemilik tempat hiburan yang tutup. Dalam hal ini diserahkan tanggung jawabnya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Sibudapar). "Kami akan undang mereka. Biar tahu masalahnya apa, kenapa sampai tutup," kata Rudi, Senin (26/2).

Diberitakan sebelumnya, di tengah belum stabilnya kon-

## Orang Ragu Mau ke Batam

**ANGGOTA** Komisi I DPRD Kota Batam, Lik Khai menilai untuk mengembangkan pariwisata, perbaikan infrastruktur adalah salah satu sektor yang harus diikuti sektor lain. Perlu diikuti dengan peningkatan bidang lainnya, termasuk pengadaan tem-

# PAD Mampet

Sambungan Hal.1

disi perekonomian Batam, tempat hiburan pun berguguran. PAD dari tempat hiburan pun bakal turun. Efek domino kondisi tersebut juga dirasakan masyarakat.

Rudi menambahkan, pemko sedang konsen melakukan pembangunan infrastruktur. Sumber dari pembangunan itu sendiri berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), termasuk di dalamnya PAD dari pajak hiburan.

"Sekarang kami konsen membangun semua ini," ujarnya.

Berkaitan dengan pariwisata, Rudi mengatakan, berdasarkan data akhir tahun lalu, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam berjumlah 1,5 juta orang.

"Imlek kemarin infonya sampai 70 ribu orang yang masuk. Ini juga berpengaruh

ke hotel-hotel," kata Rudi.

Tugas pemerintah, lanjutnya, adalah meningkatkan lama waktu tinggal wisman. Dia mengakui upaya itu belum maksimal.

"Makanya kami mau sempurnakan itu dengan pembangunan jalan-jalan. Biar orang luar nyaman saat datang ke Batam," ujarnya.

## Berpengaruh

Menanggapi adanya tempat hiburan yang tutup, anggota Komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging mengakui berpengaruh terhadap PAD. Selain itu juga terkait pula dengan kondisi lapangan kerja.

Dikatakan dia, dunia hiburan mampu menarik investor. Dimungkinkan juga akan mendatangkan nilai plus dengan kedatangan para ekspatriat.

Keberadaan orang asing

bisa pula memberi pemasukan dari pos lain bagi daerah. Oleh karena itu, Uba sependapat kondisi saat ini merupakan ancaman bagi PAD dari sektor hiburan.

Dampak muramnya bisnis hiburan akan terasa dua sampai tiga bulan ke depan. Ia pun pesimistis capaian tahun ini bisa sama tahun lalu, jika melihat kenyataan pengelolaan masih seperti sekarang.

"Memang sudah bisa dikatakan capai target dalam dua bulan terakhir. Tapi dampak tutupnya tempat hiburan itu kan bukan saat ini. Melainkan dua sampai tiga bulan ke depan," katanya.

Uba mengatakan masalah investasi dan perekonomian, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, termasuk BP (Badan Pengusahaan) Batam.

Karena, regulasi atau segala persoalan mengenai perizinan berada di lembaga tersebut.

"Saran saya sebaiknya peraturan-peraturan yang ada jangan berulang kali direvisi. Meskipun tujuannya untuk mempermudah pengusaha dan menaikkan perekonomian tetapi kenyataan di lapangan, sebaliknya," ucapnya.

Faktanya, lanjut Uba, banyak usaha yang tutup dan ekonomi masyarakat tetap sulit.

Bukan hanya itu lapangan kerja juga kian menipis. Ia sepakat pengawasan tetap dibutuhkan karena ada yang rentan terjadi penyalahgunaan.

Namun pengawasan itu sifatnya untuk memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan. (wie/rus)

# Rudi-Lukita Teken MoU Pinjam Pakai 669 Ruas Jalan

**BATAM, TRIBUN** - Wali Kota Batam, Rudi dan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo sepakat melakukan MoU soal pemanfaatan aset jalan di Kota Batam. Ini masih berkaitan dengan rencana Pemerintah Kota Batam melakukan pelebaran jalan di sejumlah ruas jalan.

Ada sebanyak 669 ruas jalan di Batam yang akan dipinjampakaikan BP Batam kepada Pemko Batam. Sembari menunggu proses hibah aset jalan dari BP Batam ke Pemko Batam selesai dilakukan.

Senin (26/2), Rudi dan Lukita melakukan pertemuan tertutup di lantai 5 Gedung Wali Kota Batam memba-

has hal tersebut.

"Pertemuan kita ini untuk mencocokkan rencana pembangunan Batam ke depan. Bicara kewenangan lahan ada di BP Batam. Kita mau dukkan mana saja jalan yang mau dilebarkan," kata Rudi, usai pertemuan.

Dalam pertemuan itu, baik Rudi dan Lukita sudah membahas sampai ke pasal-pasal yang berkaitan dengan mekanisme pinjampakai aset jalan. Jika tak ada halangan, penandatanganan MoU akan dilakukan Selasa (27/2). "Besok kita tandatangan MoU-nya," ujarnya.

Di tempat yang sama, Lukita menegaskan dari BP Batam mendukung langkah Pemko Batam untuk mela-

kukan pelebaran jalan. Apalagi danya sudah dianggarkan tahun ini.

"Proses hibahnya kan ada di Kementerian Keuangan. Sementara kita tak bisa menunggu lagi, karena dari Pemko sudah menganggarkan untuk pelebaran. Makanya kita pakai mekanisme pinjampakai," kata Lukita.

Dari pertemuan itu, Lukita mengatakan, BP Batam sepakat agar pembangunan jalan di Batam dilakukan sesuai ROW-nya. BP Batam sendiri, sudah tak lagi mengurus soal jalan.

"Pembangunan jalankan sudah dianggarkan Pemko, kami urus yang lain. Seperti bandara, pelabuhan dan sebagainya," ujar mantan Sekretaris

Menko Perekonomian itu.

Lebih lanjut soal hibah aset, dikatakan untuk aset tahap pertama, saat ini prosesnya sudah di Presiden. Aset tahap dua masih di Kementerian Keuangan. Sedangkan aset tahap tiga, menyangkut jalan, dokumennya saat ini sedang diselesaikan BP Batam dan Pemko Batam. Selanjutnya akan dikirim ke Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Yumasnur mengatakan, 669 ruas jalan yang akan dipinjampakaikan itu, merupakan jalan utama di tingkat kota. Termasuklah di dalamnya jalan-jalan di pemukiman. **(wie)**

# Bau Menyengat di Pinggir Jalan

## ► Camat Perintahkan Satgas Angkut

**BATAM, TRIBUN** - Permasalahan sampah masih perlu dicari solusi untuk menanganinya. Seperti yang terlihat di pinggir jalan menuju Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja. Tumpukan sampah tersebut membuat suasana di lokasi tidak enak dipandang dan menimbulkan bau menyengat.

Pantauan *Tribun*, tumpukan sampah tersebut terdiri dari sayuran, buah-buahan, hingga barang-barang pribadi milik warga yang sudah tak terpakai lagi. Selain tumpukan sampah, di lokasi tersebut terlihat satu unit Bin Kontener.

Bau tak sedap pun tercium dari sampah-sampah itu. Tak jarang bau yang menyengat yang berasal dari tumpukan sampah itu membuat para pengguna jalan merasa terganggu.

Sapto, seorang penjual bakso bakar keliling merasa tak nyaman setiap melintasi tumpukan sampah itu. Dia mengaku terganggu dengan bau tak sedap dari sampah itu.

"Ya terganggu, saya sering lewat sini, apalagi kalau sampahnya banyak bau semakin nggak enak," kata dia, Senin (26/2).

Senada dengan Sapto, Ahmad pun mengamini hal tersebut. Ahmad yang sedang membuang sampah ke dalam Bin Kontener berharap penampungan sampah tersebut dipindahkan.

"Kalau saya sih mestinya ya jangan di situ soalnya kalau melintas bau banget," kata Ahmad.

Dikonfirmasi *Tribun*, Camat Lubuk Baja, Novi Harmadiyastuti di kantornya menyebutkan, permasalahan sampah ini sudah maksimal penanganannya.

"Kita selalu kerahkan Satgas mengangkut sampah ini setiap hari. Ada 20 orang yang kita kerahkan," katanya.

Untuk armada kendaraan pengangkut sampah berjumlah 5 kendaraan, dan ditambah 1 boat pancung di Tanjunguma. Dan untuk jadwal pengangkatan sampah ini setiap pukul 10.00 WIB pagi sebanyak delapan kali.

"Jadi satu Satgas itu memegang satu wilayah. Untuk Bin Kontener ada 6 jumlahnya," sebutnya.

Dikatakan Novi, yang menjadi tanggung jawab untuk mengangkat sampah tersebut dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

"Kadang saat Bin Kontener itu menumpuk, belum diangkat. Kan pastinya meluber ke bawah, nah itu juga jadi masalah," ucapnya.

Kecamatan sendiri, sebut Novi bertanggung jawab mengangkat sampah yang dari perumahan warga yang langsung dibuang ke TPS. (dra)

# Batam Kekurangan 5 Ribu Ton Beras

- ▶ **Amsakar Minta Keran Impor Dibuka**
- ▶ **Bahas Inflasi Menjelang Idulfitri**

**BATAM, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengadakan pertemuan bersama Lanal, Yonif, Bank Indonesia (BI), pihak distributor, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Kantor Wali Kota Batam Lantai IV. Dalam pertemuan itu dibahas terkait pengendalian inflasi di Kota Batam.

"Sebenarnya yang kita harapkan dari tim pengendali

inflasi daerah bagaimana agar angka inflasi dari Januari 0,99 itu dapat kita tekan. Tapi secara umum rapat ini menggambarkan bahwa rapat sebulan sebelumnya itu progresnya cukup baik. Karena yang terjadi sekarang justru deflasi," ujar Wakil Wali Kota, Amsakar Achmad yang sempat memimpin rapat tersebut sesuai sidang paripurna di kantor DPRD

Kota Batam, Senin (26/2).

Amsakar menambahkan di Februari ini estimasinya akan terjadi deflasi walaupun harapan yang sebenarnya ingin terus keseimbangan. Jangan sewaktu-waktu inflasi, disisi lain deflasi. Perubahan ini, kata dia, tidak baik kondisinya.

"Yang paling baik itu seim-

● ke halaman 19

## Sepi Pembeli

**HARGA** kebutuhan bahan pokok di pasar kawasan Jodoh, Batam terlihat masih harga normal. Namun pembeli terlihat sepi. Amir, seorang pedagang mengeluh omset terus turun. Penurunan ini juga dikarenakan turunnya daya beli masyarakat.

"Susah sekarang, pembeli sepi. Padahal harga normal. Kita yang rugi. Barang ini tak bisa bertahan lama. Kalau sudah tak laku akan busuk, rugilah," katanya, Senin (26/2).

Hak tersebut dirasakannya sejak awal pergantian tahun 2017 lalu. Dan untuk mengantisipasi kerugian, dirinya juga mengurangi pengambilan barang.

● ke halaman 19

# Batam Kekurangan

Sambungan

bang. Jangan sewaktu-waktu inflasi, disisi lain deflasi. Sebenarnya ada sesuatu yang harus kita cermati bersama," kata Amsakar.

Dalam pertemuan tersebut juga ia meminta kepada Bulog untuk mempertimbangkan persoalan stok sembako. Ketersediaan sembako sebanyak 10 ribu ton di Kota Batam.

"Dari evaluasi yang kita lakukan melalui 17 distributor dan Bulog, sembako (beras) kita ini ada pada kisaran 4 ribuan ton. Kita masih butuh sekitar 5 ribuan ton untuk Batam. Oleh sebab itu Pemko sudah melakukan koordinasi dengan Komisi VI DPR RI dan dalam proses akan meneruskan surat ke Menteri Perdagangan untuk membuka keran importasi," paparnya.

Dalam pertemuan itu dibahas menyangkut barang-barang komoditis strategis

seperti cabai, bawang, sayur, dan ikan. Inilah yang paling rentan turun naiknya inflasi tersebut.

"Diharapkan di rumah-rumah, di masyarakat agar menanam cabai atau sayur mayur. Bahkan BI mengusulkan kalau bisa pekarangan sekolah juga digunakan," ucap dia.

Sebab Kota Batam bukan daerah produksi, inilah yang sangat fluktuatif mempengaruhi kondisi permintaan dan penawaran di pasar. Yang juga menjadi konsentrasi bagaimana agar menjelang puasa dan hari raya Idulfitri atau Lebaran, dapat mengantisipasi angka inflasi.

"Semua pihak sebenarnya memberikan perhatian yang sama. Ada Bulog, ada bandara, yang nanti akan berpengaruh dengan harga tiket, ada karantina yang berpengaruh

dengan ayam, daging yang masuk ke dalam," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Rahyudin menyarankan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam untuk mengundang sejumlah maskapai penerbangan. Itu untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan harga tiket pesawat, setiap kali jelang Lebaran.

Meski ibadah puasa pada Ramadan tahun ini baru dimulai Mei mendatang, Rahyudin sengaja mengingatkannya jauh-jauh hari. BPS sendiri, diakuinya, bukan bagian dari TPID, namun selalu diundang rapat lantaran berkaitan dengan data.

"Kita usul supaya Maret, April ini maskapai penerbangan diundang rapat TPID," kata Rahyudin, Senin (26/2) di lantai 4 Gedung

Wali Kota Batam.

Dengan rapat TPID itu, Rahyudin berharap, jikapun terjadi kenaikan harga tiket, namun kenaikannya bisa dilakukan secara bertahap.

"Ini untuk mengantisipasi supaya kenaikan harga tiket bisa dilakukan bertahap, jadi masyarakat juga tak berat," ujarnya.

Harga tiket pesawat sendiri, diakuinya kerap menjadi momok penyumbang inflasi setiap kali hari raya besar. Kisaran angkanya 1,15 persen. Makanya, perlu diantisipasi untuk menekan inflasi.

Selain harga tiket pesawat, pembelian pakaian baru sekolah, pembayaran SPP, setiap kali tahun ajaran baru sekolah juga menyumbang inflasi. Rahyudin menyarankan TPID melakukan langkah-langkah terkait untuk menekan hal tersebut. **(wie/rus)**

# Warga Batuaji Bisa Cek KTP

**SEMENTARA** itu terkait persoalan KTP ini Disdukcapil Kota Batam sudah melakukan pencetakan pengajuan KTP-el di Kecamatan Batuaji. Disdukmeminta warga Batuaji yang mengajukan permohonan KTP-el, agar segera melakukan pengecekan KTP-elnya di kantor Kecamatan Batuaji.

"Kita harapkan masyarakat yang mengajukan permohonan pengurusan KTP-el segera melakukan pengecekan ke kecamatan apakah KTP-elnya sudah selesai dicetak atau tidak. Sebab Disdukcapil sudah menyelesaikan pencetakan KTP-el khusus Kecamatan Batuaji," kata Kabid Pelayanan Pendaftaran Disdukcapil Batam, Mu-

hammad Teddy Nuh, Senin (26/2).

Dia mengatakan, untuk 10 ribu yang baru diterima yang dialokasikan untuk Kecamatan Batam Kota, Disdukcapil Kota Batam masih melakukan proses pencetakan blangko KTP-el.

"Kalau yang Kecamatan Batam Kota belum selesai, karena baru diterima dari pusat dan baru dilakukan pencetakan," katanya.

Dia juga menyampaikan, saat ini sudah ada sebanyak enam kecamatan yang sudah diselesaikan pencetakan permohonan-KTP-el. Diantaranya Kecamatan Bulan, Galang dan Belakangpadang di wilayah hinterland. Sedangkan di wilayah main-

land, Kecamatan Batuampar, Nongsa dan Batuaji.

"Kalau yang sudah kita distribusikan untuk penyelesaian permohonan pencetakan KTP-el itu sudah ada tujuh kecamatan. Sedangkan yang sudah selesai dicetak baru enam kecamatan," katanya.

Ia menambahkan, di tengah pencetakan untuk Kecamatan Batam Kota, Disdukcapil juga tengah mengajukan permohonan permintaan blangko KTP-el ke pusat.

"Apabila Kecamatan Batam Kota sudah selesai, kita sudah menerima tambahan blangko lagi dari pusat untuk kecamatan lainnya," katanya. **(als)**

# 8.000 Berkas KTP Masih Diproses

- ▶ **Camat Minta Warga Bersabar**
- ▶ **Utamakan Permohonan Tahun 2016**

**BATAM, TRIBUN** - Pengurusan KTP-el di Kecamatan Lubuk Baja masih menumpuk. Pencetakan masih dalam proses kurang lebih 8.000 KTP.

Camat Lubuk Baja, Novi Harmadiyastuti, menyebut masih menunggu dari Disduk Kota Batam.

"Yang sudah kita serahkan ke Disduk sampai Februari berjumlah 8.000 berkas. Dan itu menunggu proses pencetakan saja. Soalnya disana dicetak," sebutnya, Senin (26/2).

Ia menyebut pihaknya ma-

sih menunggu jadwal dari Disduk untuk penyelesaian pencetakan KTP-el tersebut untuk Kecamatan Lubuk Baja.

"Kalau untuk blangko saya rasa sudah mulai lancar, cuma masalah mesin pencetaknya ini. Karena penumpukan ini bukannya hanya Kecamatan Lubuk Baja saja," jelasnya.

Untuk penyelesaian pencetakan KTP yang sudah diterima Kecamatan Lubuk Baja saat ini berjumlah 1.000 berkas.

"Itu dari tahun 2016 sam-

pai Januari 2017. Jadi dari Februari 2017 sampai sekarang masih menunggu pencetakan,"ujarnya.

Novi mengimbau kepada warganya agar segera mengambil KTP yang sudah selesai. Pihaknya pun sudah mengingatkan masyarakat melalui SMS dan menelepon warganya melalui Kasi Pelayanan.

"Imbauan kita, kepada masyarakat coba dicek dengan datang ke kantor, terkait permohonan dari 2016 Agustus sampai Januari 2017 sudah siap," katanya. (dra)